



► PENGALIHAN ANGGARAN MBG

## Rehabilitasi Sekolah Bisa Lebih Cepat

Triyo Handoko, Yosef Leon, & Jumali  
[redaksi@harianjogja.com](mailto:redaksi@harianjogja.com)

KULONPROGO—Pemkab Kulonprogo menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto mengalihkan APBD yang sebelumnya untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) ke infrastruktur pendidikan guna perbaikan sekolah rusak. Lantaran selama ini anggaran untuk rehabilitasi gedung sekolah terbatas.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo mencatat program rehabilitasi sekolah di wilayahnya selama ini didominasi anggaran dari dana alokasi khusus (DAK). Anggaran ini dari Pemerintah Pusat yang contoh pengerjaannya dilakukan untuk pembangun SMPN 1 Wates dan relokasi SDN Percobaan 4 Wates, SDN 2 Wates dan SDN Terbahsari yang masih dibangun hingga sekarang.

► Halaman 10

### Rehabilitasi Sekolah...

Kepala Disdikpora Kulonprogo, Nur Wahyudi, menyebut realisasi rencana ini akan mempercepat rehabilitasi gedung sekolah di wilayahnya. Ada banyak sekolah di Kulonprogo yang perlu direhabilitasi. Disdikpora selama ini memiliki daftar sekolah lengkap dengan bentuk kekurangan sarana-prasarana dan kerusakannya.

Sekolah di Kulonprogo ini direhabilitasi berdasarkan prioritas. Sumber anggaran yang ada terbatas sehingga secara bertahap dilakukan tiap tahunnya. "Selama ini kami mengandalkan DAK dari Pusat, seperti di tiga SDN tadi dan SMPN 1 Wates. Tapi tahun ini apakah disetujui untuk rehabilitasi ke tahap selanjutnya belum diketahui mengingat ada *refocusing* juga," jelasnya.

APBD Kulonprogo untuk perbaikan sekolah, menurut Wahyudi, sangat terbatas sehingga andalannya hanya DAK. "Ada dari APBD tiap tahun tapi kecil-kecil anggarannya hanya dibawah Rp200 juta untuk tiap sekolah yang disasar," ungkapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, Triyono, menerangkan dana MBG dari APBD sudah disiapkannya sejumlah Rp29,5 miliar. Anggaran itu masuk belanja tak terduga (BTT) pada APBD 2025 ini.

Triyono menjelaskan masuknya dana MBG pada BTT belum dijelaskan dalam petunjuk teknis (juknis) dari Pemerintah Pusat. "Kalau sudah ada Juknisnya bisa kami masukan ke *item* lain, sementara ini di BTT."

Dana ini tidak diutak-atik penggunaannya selama belum

ada juknisnya. "Kami biarkan saja di BTT dan tidak dipakai untuk yang lain sampai ada kejelasan teknisnya," ucapnya.

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengaku bersyukur karena anggaran MBG sepenuhnya berasal dari Badan Gizi Nasional. Anggaran senilai Rp34 miliar yang telah dimasukkan dalam pos BTT pada APBD 2025 untuk pelaksanaan MBG oleh Menteri Tito diminta untuk dialihkan ke dalam program renovasi atau perbaikan sekolah. "Itu pula yang kami pikirkan. Tiba-tiba kami dapat perintah untuk menganggarkan Rp34 miliar untuk dukungan MBG. Kalau Pemerintah Pusat sudah menanggung 100 persen berarti itu akan kami alihkan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk untuk renovasi dan perbaikan sekolah," kata Halim.

Halim menilai pengalihan dana yang seharusnya untuk MBG ke program renovasi adalah hal positif.

### Tunggu Juknis

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Suhirman, mengungkapkan Pemda DIY telah menetapkan anggaran MBG 2025 sebesar Rp45 miliar yang masuk dalam pos BTT dalam APBD DIY. Disdikpora DIY masih menunggu juknis resmi dari Pemerintah Pusat tentang penggunaan anggaran itu. Suhirman menegaskan juknis sangat penting sebagai dasar hukum dalam pengeluaran anggaran. "Soal arahan Pak Presiden tentang pengalihan anggaran itu, kami masih tunggu

juknisnya seperti apa'dan juga skenarionya, karena kalau belum ada juknisnya kami akan repot. Pengeluaran anggaran harus ada dasar hukum," jelasnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Jogja, Sinarbiyat Nujatn, menuturkan dalam APBD 2025, Pemkot Jogja menyiapkan Rp80 miliar untuk program MBG. "Awalnya Rp95 miliar, tapi kemudian yang Rp15 miliar dialihkan untuk BTT [belanja tak terduga]," katanya.

Ia mengaku belum mendapat informasi resmi terkait arahan pengalihan anggaran MBG di daerah untuk perbaikan infrastruktur. Pemkot Jogja tahun ini juga sudah menganggarkan perbaikan infrastruktur pendidikan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja, Umi Akhsanti, mengatakan tahun ini ada tiga pekerjaan perbaikan infrastruktur pendidikan. Ketiga paket perbaikan infrastruktur pendidikan ini menggunakan anggaran sebesar Rp12,8 miliar.

"Rinciannya pembangunan SMPN 10 Jogja senilai Rp5 miliar, pembangunan SDN Gambiran senilai Rp3,8 miliar dan pembangunan SDN Golo senilai Rp4 miliar," katanya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Supto Wahyono, mengaku sudah mengalokasikan Rp19,7 miliar untuk MBG. "Ada formulasiya dan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah."

Disinggung mengenai anggaran MBG untuk perbaikan infrastruktur pendidikan, Putro mengaku belum ada instruksi resmi.

(David Kurniawan & Lukas Subarkah)

| Instansi                                 | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 02 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005